

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA UNTUK MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN NEGARA
DI ANAK USAHA BUMN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Rifky Effendi Hardijanto

2002190021



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifky Effendi Hardijanto
NIM : 2002190021
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN NEGARA DI ANAK USAHA BUMN”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 18 Maret 2022



Rifky Effendi Hardijanto
NIM: 2002190021



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003 TENTANG
KEUANGAN NEGARA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM ATAS KEKAYAAN NEGARA DI ANAK USAHA BUMN

Oleh:

Nama : Rifky Effendi Hardijanto

NIM : 2002190021

Program Studi : Hukum Program Magister

Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 18 Maret 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H, M.H., MBA.

NIP/NIDN: 181692/0326106005

Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si.

NIP/NIDN: 131494/8833860018

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 161306/8831640017

Direktur
Program Pascasarjana

Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si.

NIP/NIDN: 941387/0320086508



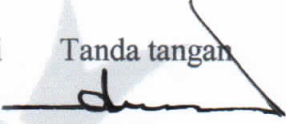

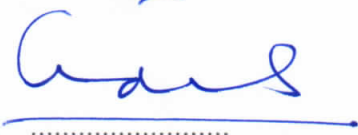
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 18 Maret 2022 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rifky Effendi Hardijanto
NIM : 2002190021
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN NEGARA DI ANAK USAHA BUMN”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H, M.H., MBA	Sebagai Ketua	
2. Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si.	Sebagai Anggota	
3. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 18 Maret 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rifky Effendi Hardijanto
NIM : 2002190021
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Tinjauan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara Untuk Memberikan Perlindungan
Hukum Atas Kekayaan Negara di Anak Usaha BUMN

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 18 Maret 2022



Rifky Effendi Hardijanto
NIM: 2002190021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kemurahan dan kasih setia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Tinjauan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Negara Di Anak Usaha BUMN.”**

Adapun maksud dari penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Orang tua Penulis terimakasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
9. Istri Penulis terimakasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Anak-anak Penulis terimakasih atas dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
11. Teman-teman di Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuan, dan semangatnya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat Penulis butuhkan demi perbaikan tesis ini. Harapan Penulis bahwa tesis ini berguna bagi para pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi/Bisnis.

Jakarta, 18 Maret 2022

Penulis



Rifky Effendi Hardijanto.

NIM: 2002190021

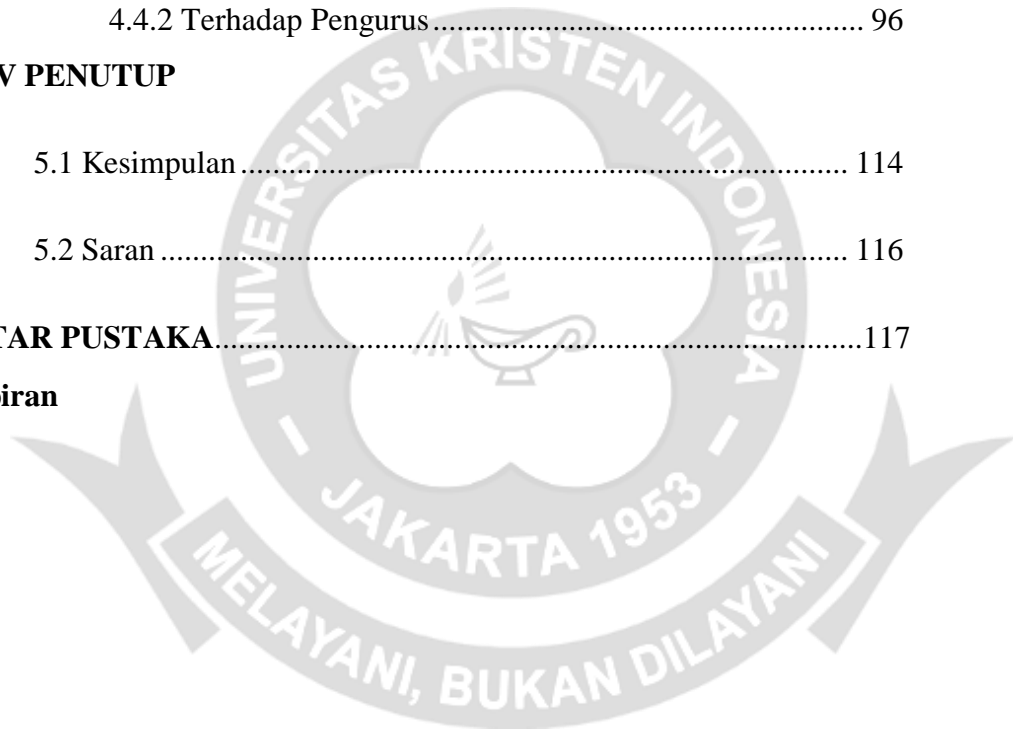


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Teori Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Konsep.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	22
1.7 Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Badan Usaha Milik Negara	29
2.1.1 Pengertian BUMN	29
2.1.2 Pengaturan Tentang BUMN	29
2.1.3 Pengertian serta Maksud dan Tujuan BUMN	31
2.1.4 Jenis dan Kepengurusan BUMN.....	32
2.1.5 Permodalan BUMN	32
2.1.6 Contoh Kasus Anak Usaha BUMN Yang Dimohonkan Pailit dan PKPU serta Likuidasi	33

2.2 Anak Perusahaan BUMN Sebagai PT.....	35
2.2.1 Pengertian Perusahaan	35
2.2.2 Klasifikasi Perusahaan	36
2.2.3 Pengertian Perseroan Terbatas.....	38
2.2.4 Pendirian Perseroan Terbatas.....	40
2.2.5 Organ Perseroan Terbatas	40
2.2.6 Perseroan Terbatas Sebagai <i> Holding Company</i>	42
2.3 Keuangan Negara	43
2.3.1 Pengertian Keuangan Negara.....	43
2.3.2 Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	45
2.3.3 Asas- Asas Pengelolaan Keuangan Negara	46
2.3.4 Pengelola Keuangan Negara	47
2.3.5 Pemisahan Kekayaan Negara Dalam Permodalan BUMN..	48
BAB III Bagaimana Rasio Posisi Keuangan Di Dalam Pembentukan BUMN dan Anak Usaha BUMN Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	55
3.1 Norma Hukum Keuangan Negara Dan Hukum Korporasi Terkait Dengan Pengelolaan BUMN	58
3.2 Logika Perdata pada Hukum Bisnis versus Logika Pidana pada Keuangan Publik.....	68
3.3 Kerugian Anak Perusahaan BUMN terkait Keuangan Negara	68
BAB IV Bagaimana memberikan perlindungan hukum atas kekayaan negara pada anak usaha BUMN dengan menggunakan Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....	79
4.1 Tata Cara Penggunaan Keuangan Negara	81
4.1.1 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara	83

4.2	Status Kedudukan Hukum Keuangan Negara Di Anak Usaha BUMN	86
4.3	Akibat Hukum Kerugian pada Perusahaan Anak BUMN	89
4.4	Keuangan Anak Usaha BUMN Dan Kerugiaanya	94
4.4.1	Terhadap lembaga (Perusahaan)	94
4.4.2	Terhadap Pengurus	96
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		117
Lampiran		



ABSTRAK

Nama : Rifky Effendi Hardijanto
NIM : 2002190021
Judul : Tinjauan Undang Undang No 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara Untuk Memberikan Perlindungan Hukum
Atas Kekayaan Negara Di Anak Usaha BUMN

Konsepsi kekayaan negara yang dipisahkan diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menimbulkan polemik dalam penyelenggaraan usaha BUMN sebagai suatu badan usaha termasuk terhadap anak perusahaan BUMN dalam bentuk Perseroan, yang menjadi perdebatan klasik mengenai ruang lingkup BUMN dan Keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan adanya saham yang dimiliki negara pada BUMN dan saham yang dimiliki BUMN pada anak perusahaan atas kekayaan dan keuangan yang telah disetorkan atau dipisahkan. banyak aktifitas bisnis utama BUMN yang justru dilaksanakan oleh anak perusahaan BUMN daripada langsung ditangani oleh perusahaan induknya. keterlibatan anak perusahaan BUMN untuk mengelola aktifitas bisnis menjadi sebuah problematika ketika kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN Persero tersebut dihadapkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam ketentuan UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU PT serta aturan pelaksanaannya melalui PP dan SEMA, baik dalam ranah hukum publik maupun dalam ranah hukum privat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN dapat diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara, dengan menggunakan 2 (dua) rumusan masalah penelitian: (1) Bagaimana Rasio Posisi Keuangan Di Dalam Pembentukan BUMN dan Anak Usaha BUMN Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan (2) Bagaimana memberikan perlindungan hukum atas kekayaan negara pada anak usaha BUMN dengan menggunakan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belum ada kesamaan pengertian tentang keuangan Negara. Pada Pasal 1 angka 1 UU No 17 tahun 2003 disebutkan bahwa Keuangan Negara dan Pasal 1 UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. BUMN sebagai badan hukum membentuk anak perusahaan serta memiliki saham di dalamnya, maka rasio keuangan negara terhadap kepemilikan saham dalam anak perusahaan tersebut berasal dari kekayaan BUMN, bukan dari kekayaan negara, sehingga tidak tunduk pada UU BUMN melainkan tunduk pada UU PT. tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara yang diatur dalam (SEMA) No.10 Tahun 2020. disharmonisasi terkait perbedaan definisi Keuangan Negara dan Keuangan Persero. yang mana pada UU Keuangan Negara menyatakan bahwa Kekayaan negara pada UU BUMN menyatakan bahwa Kekayaan negara yang dipisahkan BUMN adalah milik BUMN (dalam hal ini Persero) itu sendiri, hal ini ditandai pada Pasal 4 ayat (1) bagian penjelasan UU BUMN, Sehingga apabila ada kerugian yang terjadi pada anak perusahaan (perseroan) direksi hanya akan bertanggungjawab dan tunduk padaketentuan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, hal ini dapat menimbulkan celah hukum dimana terhadap kerugian yang terjadi pada anak usaha BUMN akan sulit dijangkau oleh Negara, mengingat tumpang tindihnya aturan yang ada, sehingga tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum keuangan negara yang ada dalam anak usaha BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam mencari keuntungan.

Kata Kunci: *Keuangan Negara, Perlindungan Hukum, Anak Perusahaan BUMN*

ABSTRACT

Name : Rifky Effendi Hardijanto
NIM : 2002190021
Title : Review of Law No. 17 of 2003 concerning State Finance to
Provide Legal Protection for State Assets in BUMN Subsidiaries

The concept of separated state assets is regulated in the provisions of Law no. 19 of 2003 concerning BUMN. State-Owned Enterprises (BUMN) in Indonesian laws and regulations have created a polemic in the management of SOEs as a business entity, including against State-Owned Enterprise subsidiaries in the form of a company, which has become a classic debate regarding the scope of BUMN and State Finance as regulated in Law No. 17 of 2003 concerning State Finance and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This is because there are shares owned by the state in BUMN and shares owned by BUMN in subsidiaries for assets and finances that have been deposited or separated. Many of the main business activities of SOEs are actually carried out by SOE subsidiaries rather than being directly handled by the parent company. The involvement of BUMN subsidiaries to manage business activities becomes a problem when the losses experienced by the BUMN Persero subsidiaries are faced with various applicable laws and regulations, both in the provisions of the BUMN Law, State Finance Law, PT Law and the implementation rules through PP and SEMA, both in the realm of public law and in the realm of private law. This study aims to examine whether the losses experienced by BUMN subsidiaries can be classified as state financial losses, using 2 (two) research problem formulations: (1) How is the Financial Position Ratio in the Establishment of BUMN and BUMN Subsidiaries according to Law no. 17 of 2003 concerning State Finances and (2) How to provide legal protection for state assets to BUMN subsidiaries by using Law no. 17 of 2003 concerning State Finance. The results of the study show that there is no common understanding of state finances. In Article 1 number 1 of Law No. 17 of 2003 it is stated that State Finance and Article 1 of Law No. 19 of 2003 concerning BUMN. BUMN as a legal entity forms a subsidiary and owns shares in it, then the ratio of state finances to share ownership in the subsidiary comes from the wealth of the BUMN, not from the wealth of the state, so it is not subject to the BUMN Law but is subject to the Law on PT. but this does not apply to subsidiaries of BUMN/BUMD whose capital is not sourced from the APBN/APBD or is not equity participation from BUMN/BUMD and does not receive/use state facilities, not including state financial losses as regulated in the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA). No. 10 of 2020. disharmony regarding the different definitions of State Finance and Persero Finance. which in the State Finance Law states that state assets in the BUMN Law state that state assets separated by BUMN are owned by the BUMN (in this case the Persero) itself, this is marked in Article 4 paragraph (1) of the explanation section of Law no. 19 of 2003 concerning BUMN. So that if there is a loss that occurs to the subsidiary (company) the directors will only be responsible and subject to the provisions of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, this can lead to legal loopholes where the losses that occur in BUMN subsidiaries will be difficult to reach by the State. considering the overlapping of existing rules, so that it does not provide legal certainty and protection of state finances that exist in State-Owned Enterprise subsidiaries as an extension of the state in seeking profit.

Keywords: State Finance, Legal Protection, State-Owned Enterprise Subsidiaries